

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia, dan merupakan hak bagi setiap warga negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pasal 28 B Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi peningkatan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang penting baik bagi negara maupun perorangan, karena pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (*human potential development*), sehingga lebih fungsional dalam menjawab semua tantangan yang datang pada dirinya (Abdulhak, 1990; Suryadi, 2005). Investasi melalui pendidikan perlu diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh setiap orang yang membutuhkannya. Melalui kegiatan pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk melahirkan perubahan tingkah laku yang bermakna. Di samping itu, kegiatan pendidikan dapat mencetuskan harapan, karena memang harapan itu sendiri terdapat pada

pendidikan (Santoso S. Hamijoyo dalam Abdulhak, 1990). Usaha-usaha yang berhubungan dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang yang bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, disertai dengan usaha perluasan pendidikan agar dapat menunjang terselenggaranya kegiatan dan pelayanan pendidikan bagi setiap orang yang membutuhkannya.

Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa secara sistemik Pendidikan Nasional diselenggarakan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Ketiga jalur tersebut bermuara pada tujuan nasional yang sama yakni “dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri secara optimal baik dalam aspek fisik material maupun aspek mental spiritual”. Dalam pasal 1 ayat (12), ditegaskan bahwa “Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Pasal 26 ayat (1), berbunyi: “Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

Pasal 26 ayat (2), berbunyi: “Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”. Kemudian pasal 26 ayat (3), menyatakan bahwa

pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pasal 26 ayat (4), berbunyi: “Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Upaya mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “ *basic needs development* “ dimana mengukur keberhasilan pembangunan dengan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life*) yang memiliki tiga parameter yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Tingkat Melek Huruf (AMH). Upaya tersebut selanjutnya memunculkan paradigma baru tentang pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (IPM/HDI). Program-program untuk pencapaian Indeks Pembangunan Manusia merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan parameter sebagai berikut :

1. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari Angka Harapan Hidup (AHH), bertujuan untuk mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.

2. Pendidikan yang diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lamanya sekolah, bertujuan untuk mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertakwa.
3. Pendapatan yang diukur dengan Daya Beli Masyarakat, untuk mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses yang layak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi Dakar tentang pendidikan untuk semua, secara konsisten perlu melaksanakan komitmen sebagai berikut:

1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas, dengan kualitas baik.
3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.
4. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan

menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

Upaya pengentasan penduduk buta huruf sangat penting dalam pembangunan manusia. *United Nations Development Programme (UNDP)* menjadikan angka melek huruf sebagai salah satu komponen dari empat indikator penentu *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, di samping rata-rata lama pendidikan, rata-rata usia harapan hidup (indeks kesehatan) dan pengeluaran keluarga (indeks ekonomi). Bahkan bisa jadi komponen melek huruf merupakan prasyarat sekaligus *trigger* bagi peningkatan indeks komposit lainnya yang menjadi penentu IPM. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif kepentingan nasional, pemberantasan buta huruf mempunyai nilai sangat strategis dan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pendidikan.

Prioritas pemberantasan buta aksara terhadap penduduk orang dewasa dalam pembangunan pendidikan, didasari oleh pertimbangan: (1) satu-satunya cara meningkatkan HDI yang paling murah dan cepat adalah dengan cara menurunkan jumlah buta aksara secara signifikan; (2) tingkat keaksaraan penduduk suatu negara sangat mempengaruhi tingkat kesehatan, gizi, kematian ibu dan anak,

kesejahteraan, dan angka harapan hidup; (3) pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara, oleh sebab itu penduduk yang masih buta aksara wajib dan prioritas memperoleh layanan pendidikan; (4) penyandang buta aksara erat kaitan dengan kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakberdayaan menjadi miskin yang bermuara pada rendahnya produktivitas penduduk. (Suryadi, 2007).

Sebagai wujud pencahangan gerakan nasional pemberantasan buta aksara intensif, diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi nasional, dengan target pada tahun 2015 adalah “tercapainya peningkatan sebesar 50% pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2015 dan akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa”. Sementara target yang ingin dicapai oleh Kabinet Indonesia Bersatu, adalah “Tercapainya peningkatan sebesar 95% pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2009”. (RPJM 2004-2009). Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang masih menyandang predikat buta huruf dilakukan melalui pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar memperoleh pendidikan, juga merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Penuntasan angka buta huruf terutama untuk kelompok produktif dibutuhkan sistem dan model pembelajaran masal, mustari, menarik dan mumpuni yang mampu memberdayakan warga belajar sehingga *out put* pendidikan keaksaraan tidak saja mampu mencapai standar kompetensi keaksaraan tingkat

dasar dalam kemampuan calistung saja, melainkan sistem dan model pembelajaran tersebut harus mampu memberdayakan warga belajar untuk dapat mengembangkan kompetensi dasar tersebut secara berkelanjutan kearah kemampuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar pada umumnya masih merasa sulit keluar dari jerat kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Bahkan masih terjadi para lulusan yang pernah mendapat surat keterangan melek aksara tingkat dasar mengalami penurunan kemampuan menjadi buta aksara kembali. Hal ini disebabkan karena mereka yang telah tergolong pasca pendidikan keaksaraan dasar masih belum memiliki kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan keaksaraan yang fungsional bagi peningkatan kualitas diri dan kehidupannya. Oleh karena itu warga belajar yang telah selesai menguasai kompetensi keaksaraan dasar perlu dikembangkan lagi kompetensi keaksarannya melalui program pendidikan keaksaraan yang dapat membantu dirinya untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Sejalan dengan itu, dewasa ini sedang dikembangkan program Keaksaraan Usaha Mandiri yang selanjutnya disingkat dengan KUM. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keberdayaan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk berusaha secara mandiri.

Untuk memberdayakan warga belajar yang telah mencapai kompetensi keaksaraan tingkat dasar, perlu dilanjutkan dengan program pendidikan keaksaraan yang dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk mampu berusaha secara mandiri. Untuk mengembangkan kompetensi keaksaraan usaha mandiri perlu dikembangkan model pembelajaran yang relevan yang di samping memperkuat kompetensi keaksaraan dasarnya juga dapat memberdayakan mereka untuk memiliki kecakapan hidup (*life skill*) untuk dapat berusaha secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah kehidupannya.

Pelaksanaan pembelajaran KUM selama ini masih memiliki kelemahan dari berbagai sudut pandang, salah satunya strategi pembelajaran KUM yang dilaksanakan selama ini. Kelemahan KUM dalam proses pembelajaran diantaranya: 1) Tutor cenderung masih menerapkan strategi pembelajaran yang klasikal atau tradisional, metode ceramah sebagai andalan dalam proses pembelajaran. 2) Pelaksanaan pembelajaran KUM belum menyentuh pada ranah kebutuhan atau masalah dari warga belajar, cenderung keputusan lebih banyak dilakukan oleh Tutor. 3) Kewirausahaan atau jenis usaha yang dilakukan oleh warga belajar, hanya sebatas pengetahuan bukan hasil pengalaman mendalam. 4) Tindak lanjut kewirausahaan sebagai strategi keaksaraan, masih terkendala dari aspek jaringan usaha dan modal usaha, sehingga proses pembelajaran hanya sebatas tuntutan bantuan proyek saja.

Sehubungan dengan kondisi tersebut penelitian ini bermaksud mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat memberdayakan warga belajar pendidikan keaksaraan baik dalam rangka memelihara dan memperkuat

kompetensi keaksaraan mereka, maupun dalam rangka memberdayakan warga belajar pasca pendidikan keaksaraan agar dapat berusaha secara mandiri. Upaya peneliti dalam mengembangkan model pembelajaran KUM ini, diantaranya untuk meminimalisir kelemahan pembelajaran KUM. Pembelajaran KUM kental dengan model pembelajaran “*learning by doing*” sebagai pengalaman belajar yang mampu menarik perhatian warga belajar dengan mengungkap “*problem*” warga belajar dalam kehidupan ekonomi. “*Learning by doing to explore problem learning of needs*” dalam pembelajaran KUM, dilakukan dengan strategi *Watching – Learning – Doing*. Sedangkan materi pembelajaran harus menyentuh kebutuhan dan masalah dari warga belajar itu sendiri sebagai kompetensi KUM yang dicapai setiap individu. Dalam pembelajaran KUM, diutamakan adalah “*experience*” warga belajar, sehingga yang paling penting dalam KUM adalah konten dan makna usahanya dalam pembelajaran keaksaraan, bukan besar atau kecilnya modal jenis wirausaha, asumsinya setiap warga belajar akan mampu melakukan dan jaringan usahapun tidak sulit. Dari gambaran tersebut, maka diperlukan model pembelajaran keaksaraan yang mengintegrasikan *problem* dan berbasis *project*, yaitu dengan model pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengungkap model pembelajaran KUM tersebut, melalui Disertasi dengan judul *Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Warga Belajar Mencapai Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (Studi di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat)*

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa selama ini penyelenggaraan pendidikan keaksaraan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama yang terkait antara lain dengan kurangnya profesionalitas pengelolaan rendahnya mutu proses pembelajaran, kurang fungsionalnya hasil belajar pendidikan keaksaraan dalam memenuhi kebutuhan untuk usaha mandiri.

Hasil penelitian Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) bekerja sama dengan BPS pada tahun 2004 pada sejumlah kabupaten di Indonesia dengan prevalensi kemiskinan dan buta huruf yang tinggi, mencatat adanya kelemahan dalam pengelolaan program keaksaraan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, koordinasi, maupun monitoring. Masalah lainnya adalah putus sekolah (*drop out*) warga belajar masih tinggi, kekurangan sarana-prasarana, model program pembelajaran tidak jelas, buku paket kurang, kekurangan tutor dan atau tutor belum terlatih, serta salah sasaran (Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Biro Pusat Statistik, 2004).

Kendala-kendala tersebut secara empirik dapat diidentifikasi dari beberapa indikasi: *Pertama*, warga belajar kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat miskin, yang disamping masih buta huruf, mereka juga secara ekonomi hidupnya masih kembang kempis karena belum memiliki keterampilan bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, meskipun pelaksanaan pembelajaran tidak menuntut biaya pada warga belajar, namun hampir keseluruhan waktu yang dimiliki warga belajar digunakan untuk bekerja dan

berusaha mencari nafkah dengan keterampilan yang sangat terbatas dan tidak menetap, sehingga mereka merasa sulit menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan belajar pendidikan keaksaraan . *Ketiga*, warga belajar kurang memahami secara jelas tujuan belajar serta kecenderungan pemanfaatan hasil belajar pada kehidupan di masa yang akan datang, karena model pembelajaran dan bahan belajar yang digunakan dalam pendidikan keaksaraan selama ini lebih menekankan pada aspek kemampuan membaca, menulis dan berhitung tingkat dasar tanpa dihubungkan secara langsung dengan mata pencaharian dan kemampuan berusaha warga belajar. *Keempat*, usia penduduk buta aksara rata-rata sudah dewasa (usia 15 tahun ke atas) tidak mudah untuk dibelajarkan, apabila tidak bersentuhan langsung dengan usaha peningkatan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kelima*, program pembelajaran pendidikan keaksaraan yang selama ini berkembang, lebih banyak menitikberatkan pada kompetensi calistung semata, lebih menitikberatkan pada percepatan pemberantasan buta aksara, sehingga para penyelenggara di lapangan seolah berlomba melakukan akselerasi dalam hitungan bulan, minggu atau jumlah hari atau jam pembelajaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan berusaha warga belajar pasca melek aksara. Padahal tujuan yang paling utama pendidikan keaksaraan adalah membantu menumbuhkan kesadaran warga belajar akan kekuatan dan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang bebas dan merdeka serta mampu mengatur dirinya secara otonom untuk berdaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung apa lagi menjadi beban bagi orang lain.

Kondisi tersebut antara lain diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara model pembelajaran yang dikembangkan dalam pendidikan keaksaraan dengan tujuan dan kebutuhan warga belajar sebagai manusia yang bebas dan merdeka yang menyadari akan potensi dan kekuatan dirinya baik secara sosial, ekonomi, politik untuk dapat berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Disamping itu hal tersebut diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara bahan belajar pada buku paket dengan kebutuhan warga belajar yang realistik guna meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian pembelajaran pendidikan yang selama ini berlangsung kurang menumbuhkan motivasi belajar warga belajar, baik untuk mempertahankan kompetensi keaksaraannya, maupun untuk menumbuhkan sikap berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Bertolak dari kondisi permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud merancang pengembangan model pembelajaran pasca pendidikan keaksaraan dasar untuk meningkatkan kompetensi warga belajar agar mampu berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.

Model pembelajaran yang dikembangkan dalam pendidikan keaksaraan ini mencakup: tujuan pembelajaran, bahan ajar, strategi pembelajaran, kurikulum, media belajar dan alat evaluasi belajar. Pendidikan keaksaraan usaha mandiri didefinisikan sebagai sebuah proses mendidik warga belajar yang sudah memiliki kemampuan calistung (membaca-menulis dan berhitung) dintegrasikan dengan pemberian keterampilan berusaha atau bermatapencapaian sehingga warga belajar (sasaran didik) memiliki daya tahan (*survive*) di dalam kehidupan secara

mandiri. Pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang maupun kelompok secara mandiri bagi warga belajar yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.

Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan usaha mandiri untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki warga belajar, (2) meningkatkan keberdayaan warga belajar melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan berusaha secara mandiri, (3) memelihara dan mengembangkan keberaksaraan warga belajar yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar (Shantini, 2010).

Mengacu pada pokok permasalahan pendidikan keaksaraan yang terjadi, mutu proses dan hasil pembelajaran pendidikan keaksaraan selama ini, diperlukan model pembelajaran pendidikan keaksaraan yang mampu memelihara, mempertahankan atau melestarikan kompetensi keaksaraan dasarnya. Selanjutnya diperlukan model pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi warga belajar, agar mampu meningkatkan keterampilan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut: *Model Pembelajaran Berbasis Masalah yang Bagaimana Untuk Meningkatkan Kemampuan Warga Belajar Mencapai Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri?*

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah proses pemecahannya, pokok permasalahan penelitian ini dapat dirinci menjadi empat pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi empirik model pembelajaran pendidikan keaksaraan selama ini di lapangan?
2. Bagaimana model konseptual pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri?
3. Bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri ?
4. Bagaimana efektivitas model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merancang model pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
2. Mengembangkan rancangan model konseptual model pembelajaran berbasis

masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri

3. Mendeskripsikan hasil implementasi model konseptual pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri
4. Memperoleh gambaran mengenai efektivitas model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri

Akhir dari penelitian ini adalah menemukan sebuah model pembelajaran yang difokuskan pada model pembelajaran berbasis masalah sebagai salah satu model pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir dalam memaknai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan definisi operasional istilah yang berkaitan dengan variabel penelitian.

1. Model pembelajaran dalam pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

Model adalah abstraksi suatu identitas (Ismadi, 2007) yang dimaknai sebagai upaya penyederhanaan suatu fenomena alamiah sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Dengan demikian model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu hal yang akan dihasilkan sebagai kerangka konseptual. Sedangkan yang dimaksud dengan model dalam penelitian ini adalah

penyederhanaan dalam bentuk representatif akurat program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), sebagai proses aktual yang memungkinkan warga belajar bertindak berdasarkan model yang diujicobakan yaitu model PBL (*Problem Based Learning*).

Dalam Pasal 1 butir 20 UU No 20 th 2003 tentang sisdiknas dinyatakan bahwa pembelajaran adalah "...proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.." Makna pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada pendidikan dalam arti sempit, yaitu pembelajaran. Pendidikan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, menjadikan orang belajar. Makna pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses atau interaksi edukasi warga belajar dengan tutor atau sumber belajar lainnya dalam program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dengan model *Problem Based Learning* (PBL). Sedangkan yang dimaksud pengelolaan pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian sistem interaksi aktivitas belajar warga belajar dan tutor yang melakukan tugas pengajaran dalam mencapai tujuan belajar warga belajar.

Program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk layanan pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan calistung, dan setelah mengikuti program ini (hasil belajarnya) mereka memiliki kemampuan baca-tulis-hitung yang didasari pendidikan kecakapan hidup yang berarti. Setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan warga belajar tidak hanya memiliki kemampuan

calistung saja tetapi mereka juga memiliki keterampilan berusaha atau bermata-pencaharian sehingga dapat *survive* dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.

2. Kompetensi Keaksaraan

Kompetensi keaksaraan dalam penelitian ini adalah ukuran minimal kemampuan keaksaraan yang harus dimiliki oleh warga belajar, untuk mengembangkan keaksaraan dan keterampilan baca-tulis-hitungnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari warga belajar. Penguasaan kemampuan seseorang warga belajar tercermin dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi warga belajar yang telah mengikuti dan/ atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar. Standar Kompetensi Lulusan KUM adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan usaha mandiri.

Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai warga belajar setelah mengikuti suatu proses pembelajaran keterampilan usaha mandiri pada satuan pendidikan keaksaraan tertentu. Kompetensi Dasar KUM adalah seperangkat kemampuan Keaksaraan Usaha Mandiri minimal yang meliputi kemampuan memilih jenis usaha, merancang usaha, melaksanakan usaha dan memelihara kelangsungan usaha.

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL)

Menurut Arends dalam (Trianto, 2009: 68), "*Pembelajaran Berbasis Masalah* adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran warga belajar pada masalah autentik, agar warga belajar dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, inkuiri dan mengembangkan kemandiriannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Makna Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dalam penelitian ini adalah metode yang menghubungkan dunia pembelajaran dengan dunia nyata yang mengelilingi warga belajar keaksaraan. Lingkungan warga belajar yang nyata secara komprehensif menuntut pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan warga belajar setelah mengikuti pembelajaran keaksaraan usaha mandiri, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan baru setelah mengalami proses pembelajaran.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil dan temuan penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dan kajian pendidikan nonformal, khususnya berkaitan dengan pengelolaan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan warga belajar mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian akan

memperkuat dan memperkaya khasanah keilmuan pendidikan non formal dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan andragogi dan metodologi pembelajarannya. Hasil penelitian ini juga memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kurikulum program pendidikan keaksaraan yang mempunyai implikasi terhadap pengemasan bahan belajar, strategi pembelajaran dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kurikulum dan pengelolaan pembelajaran akan berdampak terhadap keberhasilan pendidikan non formal dalam meningkatkan kompetensi warga belajar. Temuan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat tentang model pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis *life skill* pada satuan-satuan pendidikan non formal terutama sistem pembelajaran pendidikan keaksaraan untuk memberdayakan warga belajar mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perluasan pemberian layanan pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup untuk pemberdayaan warga belajar mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri. Hasil pengembangan model pembelajaran ini dapat direfleksikan dan didesiminasikan secara lebih luas kepada masyarakat sasaran program pendidikan keaksaraan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara, tutor, fasilitator, keluarga, serta pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya untuk memberdayakan warga belajar mencapai kompetensi keaksaraan usaha mandiri.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), merupakan program pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai keaksaraan dasar, melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) yang dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga diharapkan memiliki mata pencaharian dan berpenghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.

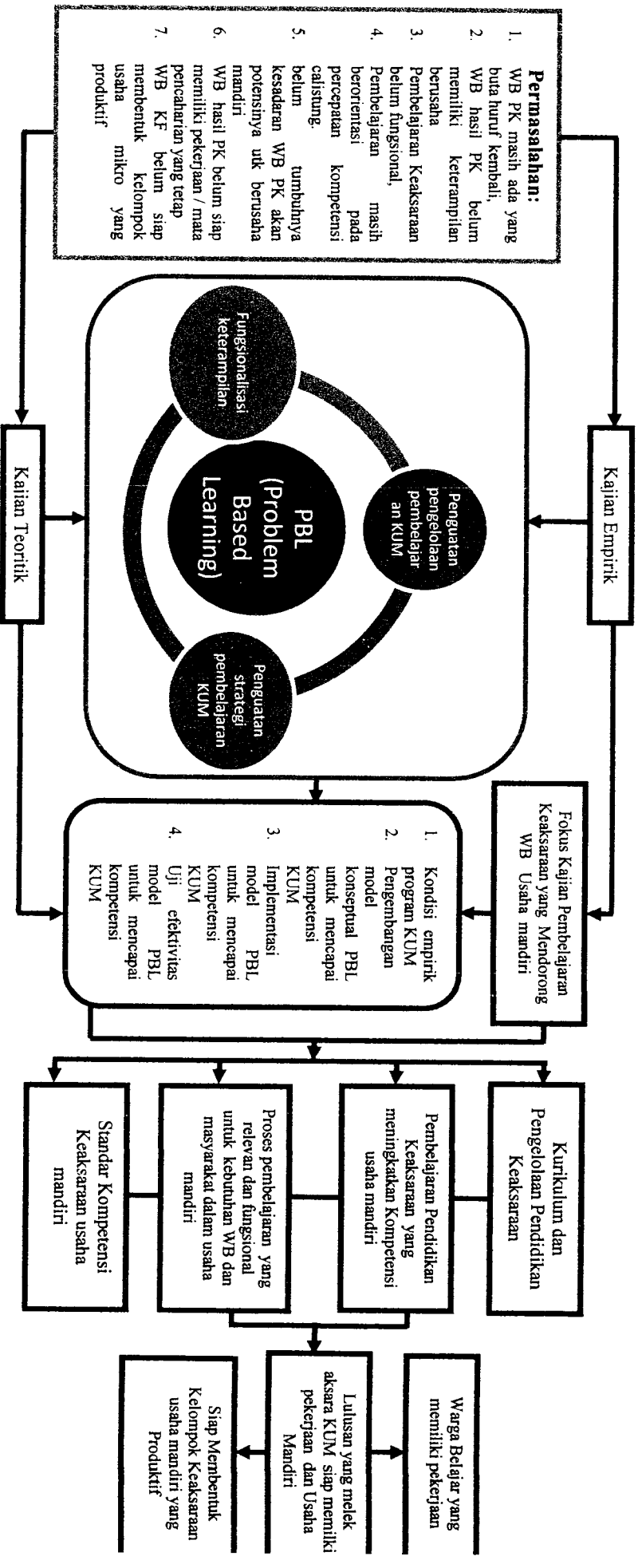
Penyelenggaraan program KUM dengan pendekatan wirausaha dan keteterampilan fungsional dilakukan, agar keberaksaraan tetap lestari dan mampu memecahkan masalah kesejahteraannya. Namun disinyalir program KUM belum optimal menjadi keberaksaraan yang lestari, dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1. Masih terjadinya buta aksara kembali, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor usia yang sebagian besar berusia 44 tahun keatas mengalami gangguan penglihatan; mayoritas warga belajar berasal dari keluarga miskin, sehingga waktu yang ada diperlukan untuk mencari nafkah; kondisi geografis warga belajar yang tersebar di pelosok-pelosok, sehingga menjadi sulit untuk mencari satu kelompok belajar (10 orang).
2. Warga belajar hasil pendidikan keaksaraan dasar belum memiliki keterampilan berusaha, sehingga menyebabkan motivasi warga belajar yang mengikuti program KUM (pasca aksara dasar) menjadi rendah, karena sudah

- ada kesan bahwa program keaksaraan tidak bermanfaat berdasarkan keminatan.
3. Pembelajaran Keaksaraan KUM yang dilaksanakan belum sepenuhnya fungsional bagi warga belajar, hal ini dikarenakan iklim pembelajaran konvensional yang belum membentuk pribadi kritis dan berfikir konstruktif pada program pendidikan keaksaraan.
 4. Pembelajaran masih berorientasi pada percepatan kompetensi calistung, sehingga belum menjadi solusi kesejahteraan warga belajar yang menyebabkan terjadinya buta huruf kembali, karena waktu warga belajar lebih banyak digunakan untuk mencari nafkah dari pada memanfaatkan kemampuan keaksaraanya.
 5. Belum tumbuhnya kesadaran warga belajar pendidikan keaksaraan memiliki potensi utk berusaha mandiri, dikarenakan pola pembelajaran KUM yang dilaksanakan belum menciptakan pribadi warga belajar yang kritis dan masih berorientasi pada calistung, belum kearah pemberdayaan pada sektor ekonomi.
 6. Warga belajar pendidikan keaksaraan belum siap memiliki pekerjaan / mata pencaharian yang tetap, karena materi yang disampaikan pada program keaksaraan belum fokus pada pengembangan kepribadian wirausaha dan pengelolaan wirausaha.
 7. Warga belajar keaksaraan belum siap membentuk kelompok usaha mikro yang produktif, karena materi kewirausahaan hanya sebagai pengetahuan saja, sedikit diimplementasikan, beberapa penyebabnya seperti modal, lokasi usaha, pemasaran, motivasi berwirausaha warga belajar.

Bertolak dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan belajar dalam program KUM. Dalam hal ini peneliti mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran yang dianggap tepat, dan sesuai dengan tujuan kurikulum dan kompetensi KUM. Model pembelajaran yang dianggap tepat yaitu model PBL (*Problem Based Learning*), karena dengan model ini diasumsikan akan membentuk pribadi warga belajar yang kritis dan berfikir konstruktif, dalam memecahkan masalah pendapatan warga belajar. Prinsip pembelajaran keaksaraan yang terdiri dari desain lokal, partisipatif, fungsional dan kontekstual relevan dengan konsep PBL yang dikembangkan, sehingga akan memberikan penguatan model pembelajaran yang lebih fokus pada langkah-langkah operasional pembelajaran. Dengan model PBL ini, maka akan ditemukan klasifikasi kebutuhan warga belajar berdasarkan keminatan, dengan output pembelajaran yaitu warga belajar yang memiliki lapangan pekerjaan baru dan siap membentuk kelompok kewirausahaan yang produktif.

Fokus kajian penelitian ini adalah pada model pembelajaran keaksaraan yang mampu mendorong warga belajar untuk memiliki kompetensi keaksaraan dan usaha mandiri (KUM). Untuk meningkatkan kompetensi warga belajar menuju keaksaraan usaha mandiri, maka yang diperlukan adalah penguatan model pembelajaran pada aspek pengelolaan pembelajaran KUM, strategi pembelajaran dan fungsionalisasi keterampilan warga belajar yang berbasis wirausaha. Kerangka piker penelitian ini dapat diragakan pada gambar 1.1. halaman berikut



Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Analisis peneliti, 2012

H. Penelitian yang Relevan

Pada studi ini, dijelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang relevan mengenai aspek yang sama tetapi sasaran yang berbeda dengan tidak merubah kajian teoeri mengenai pembelajaran berbasis masalah dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan pembelajaran berbasis masalah kepada warga belajar keaksaran yang di integrasikan dengan kehidupan dan kondisi lingkungan serta dalam merancang sebuah usaha yang telah disepakati denga kelompok belajar.

1. Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa (*Winny Liliawati dan Erna Puspita Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia*)

Kreativitas perlu dikembangkan sejak dini karena diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Salah satunya melalui pembelajaran Fisika karena konsep dan prinsipnya dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan kreativitas. Fisika sebagai wahana untuk menumbuhkan keterampilan berpikir berguna untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan mata pelajaran Fisika antara lain adalah agar peserta didik memiliki keterampilan untuk mengembangkan keterampilan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu keterampilan berpikir yang berguna untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-

hari diantaranya adalah keterampilan berpikir kreatif. Namun bertolak belakang dengan fenomena pembelajaran fisika saat ini masih bersifat *teacher-oriented* dan siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada saat pembelajaran, ternyata keempat aspek keterampilan berpikir kreatif yaitu *fluency*, *flexibility*, *originality* dan *elaboration*, yang terlihat hanya aspek *fluency* pada aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan guru itupun frekuensinya sangat kecil dari semua jumlah murid dalam satu kelas hanya sekitar 8% saja yang menunjukkan hal tersebut. Dari kenyataan di lapangan tersebut, kegiatan pembelajaran masih kurang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya. Permasalahan tersebut perlu diupayakan, salah satu caranya adalah dengan melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran.

Adapun untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Salah satu model pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah/ PBM (*Problem Based Instruction/ PBI*). PBM menurut Ibrahim dan Nur (2005: 7) mengemukakan bahwa: “PBM memiliki tujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, belajar berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan mereka dalam pengalaman nyata, menjadi pembelajar otonom dan mandiri”. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan

pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dibandingkan dengan pembelajaran tradisional.

Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan penyajian pembelajaran yang menghadapkan siswa pada situasi masalah di dunia nyata yang terjadi di lingkungannya sebelum siswa mempelajari materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan tersebut. Menurut Arends (Trianto 2007: 68), pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Mengenai tujuan pembelajaran berbasis masalah Ibrahim dan Nur (2005: 7) menyatakan bahwa:

PBM dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri yang mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri serta belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri dalam hidupnya kelak.

Tahap-tahap yang tercakup dalam pembelajaran berbasis masalah adalah (1) tahap orientasi siswa pada masalah, (2) tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, (4) tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Ibrahim dan Nur, 2005: 13).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan *control group pretest-posttest design* menggunakan teknik rotasi, yaitu

setiap dapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan *control group pretest-posttest design* menggunakan teknik rotasi, yaitu setiap kelompok dijadikan sebagai kelas eksperimen dan sebagai kelas kontrol secara bergiliran. Teknik rotasi digunakan dengan maksud untuk mengantisipasi sampel penelitian yang tidak homogen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan yang ditunjukkan dengan gain yang dinormalisasi pada kelas yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah lebih besar dari kelas yang mendapatkan pembelajaran tradisional, begitupun peningkatan pada tiap aspeknya yaitu *fluency*, *flexibility*, *originality* dan *elaboration*. Maka dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada pokok bahasan Usaha dan Energi dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagi pihak, diantaranya untuk menambah wawasan pengetahuan dan memberikan alternatif bagi guru mata pelajaran Fisika khususnya untuk menggunakan pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.

2. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Pemodelan Matematika di Kelas VII SMP Negeri 18 Palembang (Tri Noviansyah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNSRI 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah (PBM) terhadap kemampuan pemodelan matematika di kelas VII SMP Negeri 18 Palembang. Selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan mengetahui gambaran sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan

menggunakan model PBM. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 18 Palembang dan sampel penelitiannya adalah siswa kelas VII.1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah rancangan *pre-eksperimental* dengan desain *One Group Pretest-Posttest Design*.

Pengumpulan data dilakukan dengan tes terdiri dari *pretest* yang diberikan sebelum perlakuan dan *posttest* yang diberikan sesudah perlakuan, angket serta wawancara untuk melengkapi data angket. Data tes yang terkumpul dianalisis menggunakan uji-t pada taraf signifikan 5 % didapat t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung $>$ t tabel) yaitu $3,210 > 1,686$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima disimpulkan bahwa ada pengaruh positif model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemodelan matematika di kelas VII SMP Negeri 18 Palembang. Sedangkan berdasarkan data angket dan wawancara didapat bahwa siswa mempunyai sikap yang positif terhadap pembelajaran matematika dengan model PBM.

3. Model Akselerasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Untuk Mencapai Kemandirian Dan Keberlanjutan Belajar Warga Belajar (Studi di Propinsi Jawa Barat oleh Jajat S. Ardiwinata)

Gerakan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) baru dipahami sebagai komitmen internasional dan kebijakan di tingkat nasional, pada level bawah (*grass roots*) masih belum secara optimal dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan belum semua elemen aparat di lapangan memiliki apresiasi yang sama, rendahnya pemahaman, dan dukungan masyarakat. Lama belajar hanya

dua sampai tiga hari (6-9 jam) dalam seminggu, padahal kesiapan belajar masyarakat melebihi frekwensi belajar selama ini. Peran tutor, masih terkonsentrasi pada tugas pembelajaran dalam kelompok (*learning teaching proses*), belum mengakses strategi pembelajaran yang mengoptimalkan potensi lingkungan. Pembelajaran kurang mempertimbangkan perbedaan pengalaman dan kemampuan warga belajar. Pencapaian SKK masih dikonsentrasikan pada calistung, belum diproyeksikan ke arah pencapaian kemandirian dan keberlanjutan belajar. Masalahnya, apakah model akselerasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan tingkat dasar, dapat meningkatkan kompetensi keaksaraan sebagai landasan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan belajar warga belajar?

Penelitian ini dikembangkan berlandaskan kepada teori pembelajaran yang berdasarkan pengalaman (*experiential learning*), *self directed learning (SDL)*, teori pemberdayaan, konsep keaksaraan, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (*research and development*), menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model pengujian menggunakan desain eksperimen pre-test dan post-test yang diujicobakan pada kelompok tunggal (*One-Group Pretest-Posttest Design*), dan tidak menggunakan kelompok kontrol.

Berhasil diungkapkan potensi, permasalahan serta komponen-komponen penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di Jawa Barat. Implementasi model konseptual, dengan berbagai komponen yang dikembangkan mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan warga belajar secara efektif dan efisien,

artinya hasil uji efektivitas memberi keyakinan bahwa kelompok eksperimen memiliki nilai kompetensi keaksaraan tingkat dasar yang lebih baik setelah diberlakukan perlakuan model ini.

Dapat disimpulkan bahwa model akselerasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan tingkat dasar terbukti mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan tingkat dasar dan memberi indikasi dapat menjadi landasan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan belajar, hal ini diharapkan menjadi masukan dan mendukung keberhasilan program akselerasi pemberantasan buta huruf di Jawa Barat maupun di Indonesia.

4. Mutu Layanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis Budaya Lokal Untuk Peningkatan Kompetensi Dasar Warga Belajar (Studi pengembangan model pendidikan keaksaraan fungsional pada kelompok belajar di PKBM kabupaten subang oleh Uyu Wahyudin)

Masalah penelitian ini diangkat dari kondisi belum optimalnya penggunaan pendekatan budaya dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan keaksaraan fungsional berbasis budaya lokal untuk peningkatan mutu layanan belajar pada kelompok belajar yang diselenggarakan oleh PKBM. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara dan studi dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri atas 5 orang pengelola, 10 orang tokoh masyarakat, 10 orang tutor, dan 100 warga belajar (masing-masing 50 orang sebagai kelompok eksperimen dan 50 orang sebagai kelompok kontrol) yang tersebar pada lima PKBM di lima kecamatan yaitu kecamatan Cipunagara, Pagaden, Cijambe, Cisalak dan Tanjungsiang.

Hasil penelitian ini secara umum menyimpulkan: (1) warga belajar belum bisa mengenali potensi diri yang dimiliki disebabkan relatif masih rendahnya kesadaran, pengertian dan kepekaan terhadap diri dan masalah yang dihadapi dalam situasi perubahan di luar dirinya yang begitu cepat. (2) model mutu layanan pendidikan keaksaraan fungsional berbasis budaya lokal secara signifikan dapat meningkatkan penguasaan kompetensi dasar warga belajar. Unsur-unsur budaya local dikembangkan kedalam kurikulum pembelajaran, materi bahan belajar, strategi dan media pembelajaran, serta alat evaluasi hasil belajar yang sarat dengan warna budaya lokal; (3) implementasi model pendidikan keaksaraan fungsional berbasis budaya lokal dikemas melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; (4) mutu layanan belajar pada kelompok belajar yang menerapkan model pendidikan keaksaraan fungsional berbasis budaya lokal lebih baik dibandingkan dengan kelompok belajar yang tidak menggunakan intervensi model tersebut. Mutu pengelolaan pembelajaran, mutu layanan pendidikan dan kompetensi warga belajar dalam keaksaraan fungsional, satu sama lain memiliki hubungan yang positif signifikan. Mutu pengelolaan dan mutu layanan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi tingkat dasar warga belajar dalam keaksaraan fungsional.

Bersandar pada kesimpulan tersebut, model pendidikan keaksaraan berbasis budaya lokal dan mutu layanan belajar yang dikembangkan dalam studi ini secara fungsional memiliki kemanfaatan yang tinggi pada tataran aplikasi. Secara substansial bisa menguatkan landasan rasional dalam

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan menerapkan berbagai strategi yang inovatif untuk mengakomodasi keragaman budaya yang ada di masyarakat.